

ABSTRAK

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN SEKOLAH KOPI PEKON SUKAJAYA KECAMATAN SUMBER JAYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Oleh

IKE NURAFNI

Permasalahan pada penelitian ini adalah kualitas kopi yang belum optimal, faktor penghambat yaitu pupuk yang belum sesuai, pemeliharaan kebun belum sesuai, dan cuaca ekstrem. Pada tahun 2020 Sekolah Kopi direalisasikan oleh Bupati Lampung Barat periode 2019-2023 dan dialih fungsikan kepada UPTD Dinas Perkebunan dan Peternakan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji atau menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan Sekolah Kopi. Pendekatan collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008) dilihat dari aspek 1. Kondisi Awal (*Starting Conditions*), 2. Fasilitas Kepemimpinan (*Facilitative Leadership*), 3. Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*), 4. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*). Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer yang melibatkan 9 (sembilan) informan dua Dinas, UPTD Kebun Induk Kopi, Badan Penyuluhan Pertanian, Kecamatan, Pekon, dan masyarakat peserta pelatihan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kolaborasi di Sekolah Kopi berhasil dalam perkembangannya. Keberhasilan terlihat pada dimensi 1). Kondisi Awal dan 2). Proses Kolaboratif yang dapat membangun kerja sama dan komunikasi antar *stakeholders*. Proses kolaborasi yaitu a. Kolaborasi dengan PT.LDC sebagai penyediaan alat untuk keberlangsungan program pelatihan untuk masyarakat terkhusus petani kopi, b. Kolaborasi dengan Pupuk Indonesia membuat demplot sebagai sarana praktik untuk masyarakat yang mengikuti pelatihan, c. Kolaborasi dengan Rumah Kopi Ranin sebagai pengelolaan kurikulum dalam pengembangan program pelatihan petani kopi, dan d. Kolaborasi dengan Dinas PUPR bekerja sama dalam membuat sarana jalan dan *paving* blok untuk akses jalan yang memadai. Namun pada dimensi 3). Fasilitas Kepemimpinan dan 4).Desain Kelembagaan masih lemah yaitu karena, a. lemahnya koordinasi antara Dinas dengan Kecamatan dan Pekon, b. Birokrasi yang masih terpusat pada keputusan dari Kepala Dinas, c. Ketergantungan Sekolah Kopi pada anggaran APBD sehingga berdampak pada program pelatihan yang kurang optimal, dan d. sumber daya manusia (SDM) masih sangat terbatas dalam mengelola media informasi dan promosi sehingga Sekolah Kopi sulit untuk berkembang.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Sekolah Kopi, Kolaborasi, Lampung Barat.

ABSTRACT

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE DEVELOPMENT OF PEKON SUKAJAYA COFFEE SCHOOL, SUMBER JAYA DISTRICT, WEST LAMPUNG REGENCY

By

IKE NURAFNI

The problems in this study are the quality of coffee that is not optimal, the inhibiting factors are fertilizers that are not suitable, garden maintenance is not suitable, and extreme weather. In 2020, the Coffee School was realized by the Regent of West Lampung for the 2019-2023 period and was transferred to the UPTD of the Plantation and Livestock Service. The purpose of this research is to study or analyze collaborative governance in the development of Coffee Schools. The collaborative governance approach from Ansell and Gash (2008) is seen from aspect 1. Starting Conditions, 2. Facilitative Leadership Facilities, 3. Collaborative Process, 4. Institutional Design. The type of research is qualitative descriptive with primary data collection involving 9 (nine) informants from two agencies, UPTD Coffee Plantation, Agricultural Extension Agency, District, Pekon, and the training community. Data analysis is carried out through the stages of data reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that Collaboration in Coffee Schools is successful in its development. Success is seen in dimension 1). Initial Conditions and 2). Collaborative processes that can build cooperation and communication between stakeholders. The collaboration process is a. Collaboration with PT. LDC as a tool for the sustainability of training programs for the community, especially coffee farmers, b. Collaboration with Pupuk Indonesia made a demonstration plot as a means of practice for people who participated in the training, c. Collaboration with Ranin Coffee House as curriculum management in the development of coffee farmer training programs, and d. Collaboration with the PUPR Office collaborates in making road facilities and paving blocks for adequate road access. But in dimension 3). Leadership Facilities and 4). Institutional design is still weak, namely because, a. weak coordination between the Office and the District and Pekon, b. Bureaucracy that is still centered on decisions from the Head of Service, c. Coffee Schools' dependence on the APBD budget so that it has an impact on training programs that are less than optimal, and d. Human resources (HR) are still very limited in managing information and promotional media, making it difficult for Coffee Schools to develop.

Keywords: Collaborative Governance, Coffee School, Collaboration, West Lampung.